



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

## **SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN**

NOMOR: SDM-SM.02.03-011239

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



|                        |   |                                                                |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Nama                   | : | Muhammad Ardiningrat Hidayat, A.Md.Im., S.H., MPA              |
| NIP/NRP                | : | 198203052001121002                                             |
| Tempat/ Tanggal Lahir  | : | Jakarta, 05 Maret 1982                                         |
| Pangkat/Golongan Ruang | : | Pembina, (IV/a)                                                |
| Jabatan                | : | Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum |
| Instansi/Unit Kerja    | : | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh                          |

# **LULUS**

pada Pelatihan Penguatan Substansi Pelayanan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025 di Depok yang meliputi 26 jam pelajaran.

Depok, 10 April 2025  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

## DAFTAR MATA PELATIHAN

1. Penguatan Fungsi Majelis Pengawas (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait Layanan Kenotariatan (2 JP);
2. Peningkatan Pengamanan terkait dengan Layanan Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia (2 JP);
3. Kecepatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tantangan dan Strategi (2 JP);
4. Perencanaan Peraturan Perundang-undangan (2 JP);
5. Teknis Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Daerah (2 JP);
6. JDIHN : Strategi dan Implementasi dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Hukum (2 JP);
7. Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual (2 JP);
8. Kekayaan Intelektual di Era Digital (2 JP);
9. Strategi Layanan dan Promosi Kekayaan Intelektual di daerah (2 JP);
10. Pengantar Badan Strategi Kebijakan (BSK) (2 JP);
11. Penguatan Substansi Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum di wilayah (2 JP);
12. Pengarahan Action Plan (1 JP);
13. Seminar Action Plan (3 JP).

Depok, 10 April 2025  
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan  
Teknis dan Kepemimpinan,

Mutia Farida